



**DISDIKBUD
BALIKPAPAN**

SAKIP* 2024** ***DISDIKBUD ***BALIKPAPAN***



[disdikbud.balikpapan](https://disdikbud.balikpapan.id)



[Disdikbud Kota Balikpapan](https://www.youtube.com/DisdikbudKotaBalikpapan)



disdikbudbalikpapan.id

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat diselesaikan. LKIP ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kebudayaan selama tahun anggaran 2024.

Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta realisasi anggaran yang telah dialokasikan. LKIP ini juga memuat analisis terhadap capaian kinerja, tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Penyusunan LKIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa LKIP ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKIP ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di Kota Balikpapan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Balikpapan,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
kota Balikpapan



Irfan Taufik

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024

Memberikan gambaran tentang pencapaian atas target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional sebagai penjabaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mengemban pelaksanaan dari Visi-Misi Wali Kota terpilih Tahun 2021- 2026, yang kemudian dijabarkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memiliki sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan Indikator capaian Harapan lama Sekolah target 14.25 tahun, terealisasi 14.25 atau terpenuhi dan, Rata-rata Lama Sekolah target 10.94, terealisasi 10.99 atau melebihi target
2. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan Nilai Sakip 70.00 belum mencapai target 70.37 atau 99.47 %
3. Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan dengan hasil 0.93 melebihi target 0.75 atau, 124%

Adapun beberapa kendala yang dialami dalam hal pencapaian sasaran sstrategis tersebut adalah data pendukung dalam penyusunan dokumen dan koordinasi dengan bidang - bidang belum maksimal, sehingga menghambat dalam proses Penyusunan Laporan Kinerja. Selain itu adanya kendala dalam pembahasan menentukan perumusan Indikator kinerja yang dianggap tidak sesuai sehingga memperhambat dalam pembahasan dan penyusunan laporan, Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala- kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang dapat diuraikan sebagai berikut :

Memberikan sosialisasi kepada bidang-bidang dan satuan Pendidikan semua jenjang dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam proses penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif.....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar.....	5
 BAB I PENDAHULUAN.....	 7
1.1.... Latar Belakang.....	7
1.2.... Landasan Hukum.....	8
1.3.... Maksud dan Tujuan.....	9
1.4.... Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	9
1.5.... Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	13
1.6.... Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II PERENCANAAN KERJA.....	 15
2.1.... Perencanaan Strategis.....	15
2.2.... Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	31
2.3.... Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	32
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 40
3.1..... Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	40
3.2..... Capaian Kinerja Organisasi.....	42
3.2.1.. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	43
3.2.2.. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	44
3.2.3.. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.....	45
3.2.4.. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja).....	47
3.2.5.. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	51
3.2.6.. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	57
3.2.7.. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	77
 BAB IV PENUTUP.....	 87

Daftar Tabel

Tabel 1.1.... Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024.....	12
Tabel 2.1..... Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024.....	16
Tabel 2.2....Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan.....	17
Tabel 2.3.... Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	30
Tabel 2.4.... Indikator kinerja Utama (IKU) PerubahanTahun 2024.....	31
Tabel 2.5....Perjanjian KinerjaPerubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024.....	32
Tabel 2.6.... Rencana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024.....	33
Tabel 3.1.... Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024.....	40
Tabel 3.2.... Matrik Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024.....	42
Tabel 3.3.... Predikat Capaian Kinerja.....	43
Tabel 3.4.... Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	43
Tabel 3.5.... Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	44
Tabel 3.6.... Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra...	45
Tabel 3.7.... Rata-Rata Lama Sekolah.....	47
Tabel 3.8.... Harapan Lama Sekolah.....	49
Tabel 3.9.... Realisasi Kinerja yang mengacupada SPM/ Standar Nasional/Internasional (benchmark Kinerja).....	50
Tabel 3.10.. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	51
Tabel 3.11.. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	57
Tabel 3.12... Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	77
Tabel 3.13.. Komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan.....	78
Tabel 3.14.. Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp).....	79
Tabel 3.15.. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	80
Tabel 3.16.. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	84

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.....	5
Gambar 3.1	Rata-rata lama Sekolah.....	47
Gambar 3.2	Harapan Lama Sekolah.....	48
Gambar 4.1	Kolase Kegiatan Disdikbud Kota Balikpapan.....	89

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyusunan LKIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah. LKIP ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 didasarkan pada beberapa landasan dan pertimbangan utama:

- 1. Akuntabilitas Kinerja:** LKIP merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2024. Melalui laporan ini, Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- 2. Akuntabilitas Kinerja:** LKIP merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2024. Melalui laporan ini, Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- 3. Tuntutan Reformasi Birokrasi:** LKIP merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kinerja Perangkat Daerah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- 4. Evaluasi dan Peningkatan Kinerja:** LKIP berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Melalui laporan ini, dapat diidentifikasi capaian, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja Perangkat Daerah di masa mendatang.
- 5. Kebutuhan Informasi Publik:** LKIP diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi publik mengenai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Laporan ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, media, dan pihak terkait lainnya yang berkontribusi dalam perkembangan pendidikan dan kebudayaan di Kota Balikpapan.

Perencanaan dan Penganggaran: Informasi yang terdapat dalam LKIP dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan dan penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan di tahun berikutnya. Dengan mengetahui capaian dan tantangan yang dihadapi, Perangkat Daerah dapat menyusun program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan:

1. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
5. Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
6. Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
8. Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

15. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025
18. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
19. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan LKjIP adalah untuk melaporkan capaian kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan. Adapun tujuan penulisan LKjIP yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah guna meningkatkan kinerjanya.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Balikpapan berkedudukan di Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu terletak di Jalan Ruhui Rahayu Sepinggian. Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022, Kepala Dinas mengemban tugas dan fungsi berikut:

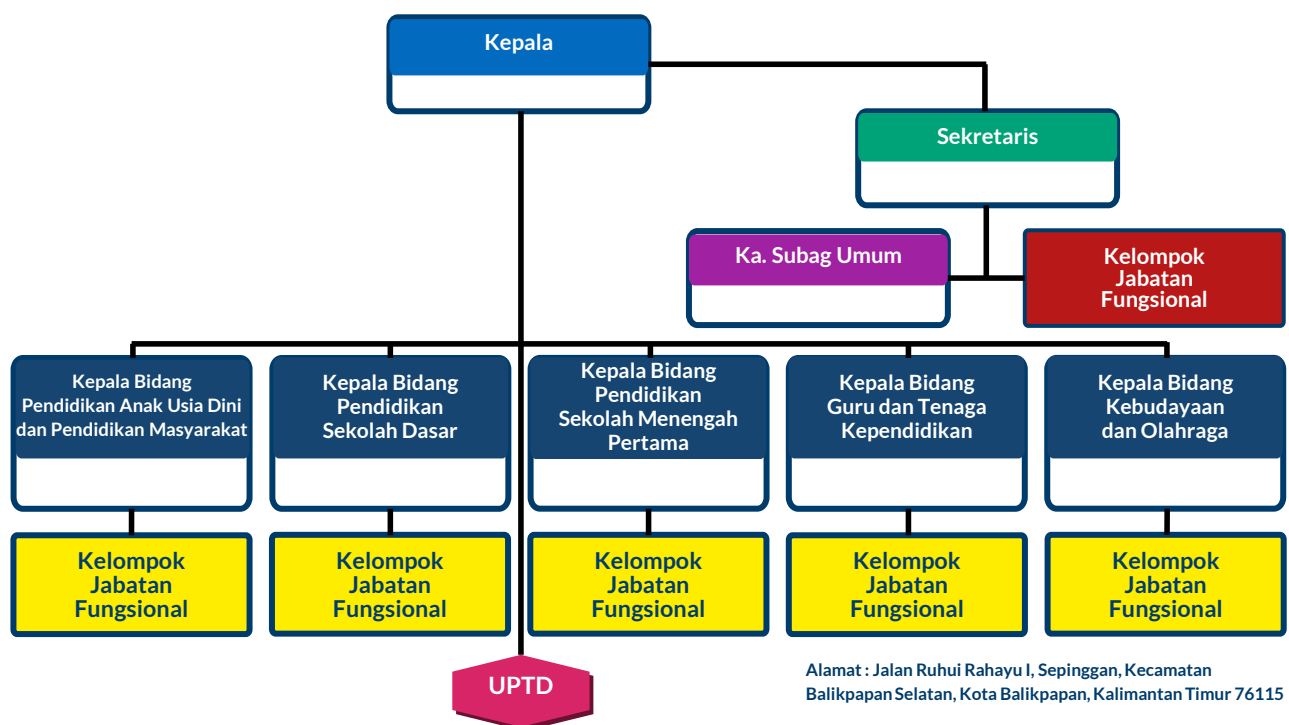
1. Menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya;
4. Perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai standar nasional pendidikan;
5. Penyusunan rencana pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembelajaran, sarana, prasarana utilitas sekolah;
6. Penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal kesetaraan, pendidikan sekolah dasar, dan pendidikan sekolah menengah pertama;

7. Penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian perizinan, kurikulum, bahasa dan sastra;
8. Penyusunan perencanaan pembiayaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kebudayaan;
9. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal/kesetaraan, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, bahasa dan sastra serta kebudayaan;
10. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana prasarana, dan utilitas pendidikan dan kebudayaan;
11. Penyelenggaraan pemantauan, pengendalian dan analisis kelayakan sarana prasarana, dan utilitas sekolah serta mutu pendidikan;
12. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal/kesetaraan, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, bahasa dan sastra serta kebudayaan;
13. Pelaksanaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan;
14. Penyelenggaraan layanan perizinan/rekomendasi/surat keterangan di bidang pendidikan dan di bidang kebudayaan;
15. Penyelenggaraan pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra;
16. Pembinaan dan pengendalian UPTD; dan
17. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Diagram Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan sebagai berikut:

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi



Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas didukung oleh pejabat eselon III, eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Pelaksana. Pejabat Eselon III di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS, Kepala Bidang PSD, Kepala Bidang PSMP, Kepala Bidang GTK, Kepala Bidang Kebudayaan dan Kasubag Umum. Jabatan Fungsional tertentu diisi oleh Perencana, Pengembang Tehnologi Pembelajaran, Pamong Budaya, Analis, Penilik, Pengawas, Guru, Pamong Belajar dan Pranata Komputer. Sementara untuk Jabatan Fungsional Pelaksana diisi oleh Pengadministrasi Perkantoran.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan
Tahun 2024

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	S1/DI V	DIII	SLTA	SLTP	SD
Jabatan Struktural	4	4	7	1	-	-	5	3	-	-	-	-
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Eselon III												
Sekretaris	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kabid PAUD & DIKMAS	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kabid SD	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kabid SMP	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kabid Guru & Tenaga Kependidikan	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kabid Kebudayaan dan Olahraga	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kasubbag Umum	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Jabatan Fungsional Tertentu	31	35	44	21	1	-	10	54	2	-	-	-
Perencana Ahli Muda	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli	4	2	2	4	-	-	1	5	-	-	-	-
Pamong Budaya Ahli Muda	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Analisis SDM Ahli Muda	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Penilik PAUD	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
Pengawas TK	-	9	8	1	-	-	-	9	-	-	-	-
Pengawas SD	8	8	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-
Pengawas SMP	7	3	10	-	-	-	4	6	-	-	-	-
Guru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pamong Belajar	5	10	2	13	-	-	-	15	-	-	-	-
Pranata Komputer	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-
Jabatan Fungsional Pelaksana	40	72	-	42	34	5	-	19	8	79	6	-
Pengadministrasi Perkantoran (PNS)	28	53	-	42	34	5	-	17	8	50	6	-
Pengadministrasi Perkantoran (Honorir)	12	19	-	-	-	-	-	2	-	29	-	-
Jumlah	75	111	51	64	35	5	15	76	10	79	6	-

Sumber Data : Dikbud Kota Balikpapan, 2024.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Dalam rangka mencapai keberhasilan tujuan kesatu, maka Disdikbud menerapkan strategi penguatan pengelolaan pendidikan, serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Implementasi strategi melalui kebijakan perangkat daerah antara lain dilaksanakan melalui:

1. optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan penambahan ruang kelas baru;
2. optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (pakaian seragam bagi peserta didik baru);
3. penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata (Subsidi SPP, pemberian beasiswa untuk siswa dengan kondisi keluarga tidak mampu/gakin, dan pemberian bantuan operasional sekolah/BOSP daerah);
4. optimalisasi pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik sekolah negeri dan swasta;
5. pemberian beasiswa guru;
6. peningkatan jumlah tenaga pendidik;
7. Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional Pembinaan Sejarah ;
8. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Pengelolaan kebudayaan dan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kab/kota;
10. Pemberdayaan SDM Sejarah Lokal;

Terdapat beberapa permasalahan yang seringkali ditemui dalam optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi proses perencanaan antar bidang dan dengan satuan Pendidikan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pembelajaran berbasis IT bagi satuan Pendidikan;
3. Belum optimalnya perencanaan antara Dinas Pendidikan dan kebudayaan dengan dengan;
4. Kurangnya Kurangnya peningkatan kompetensi ASN di bidang perencanaan melalui pengembangan jabatan fungsional perencanaan;

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Menguraikan secara singkat latar belakang penyusunan LAKIP, Struktur organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta permasalahan utama
3. Bab II Perencanaan Kinerja
4. Memuat Rencana Strategis 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Bab III Akuntabilitas Kinerja
6. Memuat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran
7. Bab IV Penutup
8. Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi
9. Lampiran

Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam rangka untuk mencapai efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan serta dengan melihat tingkat pelayanan dan permasalahannya serta ketersediaan sumber daya Manusia yang dimiliki serta tantangan dan peluang yang ada dengan tetap memperhatikan pula mandat yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Grand Strategi Pembangunan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur dan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih masa bhakti 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2016-2021.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran seperti termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yaitu :

Visi :

Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai madinatul iman.

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi

Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota Yang Memadai

Misi 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan

Misi 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif

Adapun tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:

Tujuan Strategis

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026, dirumuskan berdasarkan jenjang layanan Pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikehendaki. Dengan demikian, Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 adalah “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas Intelektual, cerdas Emosional, cerdas Spiritual dan berdaya saing”

Sasaran Strategis

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2021, secara detail akan diuraikan dalam indikator kinerja.

Sasaran strategis untuk setiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.Meningkatnya kualitas pendidikan
- 2.Meningkatkankualitas hidup dankesejahteraan masyarakatsecara menyeluruh dan berkelanjutan
- 3.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Budaya Daerah

Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Disdikbud Tahun 2021-2026 diuraikan dalam dalam tabel bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan		Indeks Pendidikan	0.748	0.755	0.762	0.769	0.777	0.784
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.14	14.16	14.17	14.18	14.19	14.2
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10.68	10.7	10.71	10.72	10.73	10.74
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.03	78.03	80.03	82.03	84.03	86.03
2. Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah		Indeks Warisan Budaya	0.492	0.496	0.4962	0.4964	0.4965	0.4975
	Meningkatnya pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Presentasi Pemajuan Kebudayaan Lokal	N/A	0.25	0.43	0.75	1.06	1.37

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Tabel 2.2

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kerja	Target Tahun 2024	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	1.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pendidikan	0.769	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
						1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.18			1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)
	2.Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10.72			1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
						1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
		Nilai SAKIP	82.03			1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)

1.01.02.2.01.14
Pengadaan Mebel
Sekolah

1.01.02.2.01.16
Pengadaan
Perlengkapan
Sekolah

1.01.02.2.01.21
Penyediaan Biaya
Personil Peserta
Didik Sekolah
Dasar

1.01.02.2.01.22
Pengadaan Alat
Praktik dan
Peraga Siswa

1.01.02.2.01.25
Pembinaan Minat,
Bakat dan
Kreativitas Siswa

1.01.02.2.01.27
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
pada Satuan
Pendidikan
Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.28
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
Sekolah

1.01.02.2.01.29
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Dasar

						1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
						1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
						1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
						1.01.02.2.01.46 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
						1.01.02.2.01.47 Pembangunan Ruang Kelas Baru
						1.01.02.2.01.48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						1.01.02.2.01.50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
						1.01.02.2.01.51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

1.01.02.2.01.30
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan Dana
BOS Sekolah
Dasar

1.01.02.2.01.31
Pembangunan
Laboratorium
Sekolah Dasar

1.01.02.2.01.38
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi Layanan
di Bidang
Pendidikan

1.01.02.2.01.46
Pengadaan
Perlengkapan
Peserta Didik

1.01.02.2.01.47
Pembangunan
Ruang Kelas Baru

1.01.02.2.01.48
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Sarana, Prasarana
dan Utilitas
Sekolah

1.01.02.2.01.50
Penyelenggaraan
Proses Belajar
Bagi Peserta Didik

1.01.02.2.01.51
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Ruang Kelas
Sekolah

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
					1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
					1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SMP)
					1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium
					1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
					1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
					1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SMP)
					1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

						1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
						1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah
						1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
						1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
						1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP
						1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
						1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
						1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

						1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
						1.01.02.2.02.58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
						1.01.02.2.02.59 Pembangunan Ruang Kelas Baru
						1.01.02.2.02.62 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
						1.01.02.2.02.64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
					1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
						1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
						1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

1.01.02.2.03.07
Pengadaan Mebel
PAUD

1.01.02.2.03.09
Pengadaan
Perlengkapan
PAUD

1.01.02.2.03.12
Pengadaan Alat
Praktik dan
Peraga Siswa
PAUD

1.01.02.2.03.16
Pengembangan
Karir Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
pada Satuan
Pendidikan PAUD

1.01.02.2.03.17
Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen PAUD

1.01.02.2.03.18
Penelolaan Dana
BOP PAUD

1.01.02.2.03.19
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan Dana
BOP PAUD

1.01.02.2.03.25
Koordinasi,
Perencanaan,
Supervisi dan
Evaluasi Layanan
di Bidang
Pendidikan

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
	1.01.02.2.04.27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
	1.01.02.2.04.36 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	1.01.02.2.04.40 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

						1.01.02.2.04.48 Pengadaan Mebel Sekolah
						1.01.02.2.04.50 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
				1.01.03 Program Pengebangan Kurikulum	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.07 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
					1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				1.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
						1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
	1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan
	1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD

					1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
						1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Indeks Warisan Budaya	0.4964	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
		Presentasi Pemajuan Kebudayaan Lokal	0.75		2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
						2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

					2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
				2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
						2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
				2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
				2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
						2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya
						2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
						2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Sasaran pertama, memiliki strategi yang mengarah pada urusan pendidikan diantaranya penguatan pengelolaan Pendidikan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan seperti: optimalisasi pembangunan unit sekolah baru dan penambahan ruang kelas, optimalisasi pengadaan perlengkapan siswa (seragam peserta didik baru), penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan Pendidikan berkualitas yang merata, serta peningkatan jumlah tenaga pendidik. Sasaran kedua memiliki strategi yang mengarah pada urusan kebudayaan diantaranya melalui penguatan pengembangan kesenian tradisional dan penguatan pengembangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Strategi tersebut dapat direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan seperti: optimalisasi pembinaan kesenian dalam daerah dan peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan cagar budaya.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Penguatan pengelolaan pendidikan	Optimalisasi pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang Kelas
			Optimalisasi pengadaan Perlengkapan Siswa (Pakaian Seragam bagi Peserta Didik Baru)
			Penyediaan subsidi pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas yang merata
			Optimalisasi Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Negeri dan Swasta melalui Beasiswa bagi guru yang belum D.IV/ S.1
			Peningkatan jumlah tenaga pendidik
Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Penguatan pengembangan kesenian tradisional Penguatan pengembangan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Optimalisasi pembinaan kesenian dalam daerah
			Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan cagar budaya

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

2.2 Indikator Kinerja Utama 2024

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perubahan IKU RB menjadi SAKIP berdasarkan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/505/AA.05/2024 tanggal 27 November 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, maka perangkat daerah melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor 420/370/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Perubahan IKU Perangkat Daerah sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2.4.
Indikator kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS	Disdikbud Kota Balikpapan
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS	Disdikbud Kota Balikpapan
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP merupakan Instrumen yang digunakan untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil dari anggaran yang dipergunakan.	Hasil Penilaian SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Inspektorat Kota Balikpapan	Disdikbud Kota Balikpapan
3	Meningkatnya pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase pemajuan kebudayaan lokal merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui pemajuan kebudayaan lokal berdasar kompetensi SDM Kebudayaan dan kuantitas peninggalan cagar budaya yang dilestarikan.	$\frac{(c + (a+b) \times 100\%)}{2}$ Keterangan: a = Jumlah SDM Kebudayaan yang tersertifikasi b = Jumlah Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya Tingkat Kota c = persentase pemajuan kebudayaan	Disdikbud Kota Balikpapan	Disdikbud Kota Balikpapan

Sumber :

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dengan sumber dana anggaran yang ada, maka Perangkat Daerah telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2024 berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan perubahan kinerja, khususnya yang menyangkut anggaran, maka telah disusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.25
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.94
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai	70.37
3	Meningkatnya pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	Point	0.75

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, 2024.

Pencapaian Sasaran di atas, didukung dengan empat program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengembangan Kebudayaan
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
7. Program Pembinaan Sejarah
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni (APBD) sebesar Rp 951.971.066.212 (Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Puluh enam Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) dan anggaranperubahan (P-APBD) menjadi Rp. 1.042.485.727.444,00 (Satu Triliun Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Rencana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun	Program/Kegiatan/SUB Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14.25	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	481.350.995.753,00	APBD/DAK
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.94	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	183.961.523.710,00	APBD/DAK
				1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	274.513.700,00	DAK
				1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	50.000.000,00	APBD
				1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	333.238.000,00	DAK
				1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.500.000.000,00	APBD
				1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.000.000,00	APBD
				1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	600.000.000,00	APBD
				1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)	600.000.000,00	APBD
				1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	1.000.000.000,00	APBD
				1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.000.000.000,00	APBD
				1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	149.999.700,00	APBD
				1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	15.658.000.000,00	DAK
				1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.517.700.200,00	APBD
				1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.830.000.000,00	APBD

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.229.055.900,00	APBD
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	133.041.655,30	DAK
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	500.000.000,00	APBD
1.01.02.2.01.31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	794.231.600,00	DAK
1.01.02.2.01.38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	166.999.790,00	APBD
1.01.02.2.01.46 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	11.699.999.300,00	APBD
1.01.02.2.01.47 Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.010.996.000,00	APBD
1.01.02.2.01.48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.581.465.620,00	APBD
1.01.02.2.01.50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	29.186.672.500,00	APBD
1.01.02.2.01.51 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.550.362.000,00	APBD
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	219.367.260.743,00	APBD/DAK
1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	66.300.000.000,00	APBD
1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.010.244.784,00	DAK
1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SMP)	1.200.000.000,00	APBD
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	3.859.790.488,00	DAK
1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.441.736.786,00	DAK
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.498.010.860,00	DAK
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SMP)	215.895.474,00	DAK
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.049.795.122,00	APBD
1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.601.538.034,00	DAK
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	2.200.000.000,00	APBD
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	300.000.000,00	APBD

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.600.000.000,00	APBD
1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9.044.750.000,00	APBD
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.000.000.000,00	APBD
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	79.705.863.243,00	DAK
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	300.000.000,00	APBD
1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	389.860.000,00	APBD
1.01.02.2.02.58 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	34.637.360.000,00	APBD
1.01.02.2.02.59 Pembangunan Ruang Kelas Baru	10.000.000.000,00	APBD
1.01.02.2.02.62 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	11.300.000.000,00	APBD
1.01.02.2.02.64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	172.592.452,00	DAK
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	44.692.949.500,00	APBD/DAK
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	406.937.000,00	DAK
1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	180.000.000,00	APBD
1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	448.617.500,00	APBD
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	2.675.000.000,00	APBD
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	11.447.500.000,00	APBD
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	247.555.000,00	DAK
1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	16.502.600.000,00	APBD
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.324.800.000,00	APBD
1.01.02.2.03.18 Penelolaan Dana BOP PAUD	10.519.002.000,00	DAK
1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	110.000.000,00	APBD
1.01.02.2.03.25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	130.000.000,00	APBD

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	476.251.346.926,00	APBD
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	475.484.698.426,00	APBD/DAK
1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	766.648.500,00	APBD
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	167.258.800,00	APBD
1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	167.258.800,00	APBD
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	909.000.000,00	APBD
1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	909.000.000,00	APBD
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.235.624.590,00	APBD
1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.330.000,00	APBD
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.483.954.500,00	APBD
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.604.340.090,00	APBD
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	400.000.000,00	APBD
1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	APBD
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	APBD
1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000.000,00	APBD
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.421.233.575,00	APBD
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	530.000.000,00	APBD
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	891.233.575,00	APBD
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.056.828.000,00	APBD
1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	576.346.000,00	APBD

				1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	231.830.000,00	APBD
				1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.248.652.000,00	APBD
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	0.75	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	928.000.000,00	APBD
				2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	868.000.000,00	APBD
				2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60.000.000,00	APBD
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.326.100.000,00	APBD
				2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.326.100.000,00	APBD
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	APBD
				2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	50.000.000,00	APBD
				2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.962.890.000,00	APBD
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.962.890.000,00	APBD
				2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.912.890.000,00	APBD
				2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	50.000.000,00	APBD
				2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	60.000.000,00	APBD
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	APBD
				2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	60.000.000,00	APBD
				2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.145.000.000,00	APBD
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	145.000.000,00	APBD
				2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	85.000.000,00	APBD

				2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	60.000.000,00	APBD
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	APBD
				2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	800.000.000,00	APBD
				2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	200.000.000,00	APBD

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, 2024.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 tergambarkan dalam tingkat capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melalui pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini dilakukan dengan menerapkan SAKIP untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan diseluruh instansi pemerintah. Evaluasi tersebut dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori.

Evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta PP No. 9 tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Berikut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	23.9
2	Pengukuran Kinerja	30%	20.8
3	Pelaporan Kinerja	15%	10.2
4	Evaluasi Kinerja	25%	16.1
Nilai Evaluasi		100%	70.0
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	

Sumber : Sumber : LHE AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Hasil evaluasi atas AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yaitu dari 69.37 menjadi 70.00 dan tetap memperoleh predikat B (baik). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan penjelasan sebagai berikut :

Hasil evaluasi atas AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yaitu dari 69.37 menjadi 70.00 dan tetap memperoleh predikat B (baik). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan penjabaran sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, dokumen perencanaan ;
- Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- Dokumen perencanaan kinerja yaitu Renstra, Renja OPD dan Perjanjian Kinerja yang sudah tersusun;
- Sebagian besar isu strategis telah tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai;
- Perencanaan Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung pada kinerja yang ingin dicapai;
- Penyusunan Target, indikator tercapai dengan baik.

2. Pengukuran Kinerja

- Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja dengan saling koordinasi;
- Melalui Aplikasi Reaksi Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu per triwulan;
- Pengumpulan dan penyusunan Data kinerja sebagian relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai yang tidak berdampak terhadap kinerja

3. Pelaporan Kinerja

- Laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu per tiga bulan;
- Laporan kinerja sebagian besar telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Laporan kinerja sebagian besar telah mengungkapkan informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja;
- Kinerja yang disajikan dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun hanya bersifat sebagian;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja, namun belum menyeluruh.
- Masih kurangnya personil yang mumpuni dalam mengkomodifikasi semua kegiatan teknis yang ada, terutama di bidang perencanaan sehingga pelaporan masih kurang terarah.

4. Evaluasi Kinerja

- Perbaikan dan peningkatan kinerja sebagian dengan Mengevaluasi akuntabilitas kinerja ;
- Menindak lanjut hasil evaluasi dari Inspektoral.

Tabel 3.2

**Matrik Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024**

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	- Melakukan revidi indikator sasaran ke-1 dan ke-3 agar memenuhi unsur kecukupan - Memanfaatkan pohon kinerja dalam perencanaan kinerja instansi - Melibatkan instansi Pemerintah (crosscutting)	Sasaran 1 : merupakan bagian dari Renstra dan targetnya akan disesuaikan agar challenging; Sasaran 3 : Akan dilakukan diskusi internal untuk perbaikan pengukuran indikator yang dapat dicapai Crosscutting : Melakukan koordinasi dengan OPD kontributor
2	Pengukuran Kinerja	Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan pengukuran capaian kinerja	Memaksimalkan Aplikasi reaksi dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Per Tri wulan
3	Pelaporan Kinerja	-	-
4	Evaluasi Kinerja	- Memanfaatkan hasil evaluasi berkala untuk mendorong tercapainya kinerja - Melakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi guna mendorong tercapainya kinerja

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, 2024.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja indikator sasaran strategis menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber : Bagian Organisasi Tata Laksana 2024

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang telah diperjanjikan kerjanya. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.25	14.25	100.00%	Tercapai/ Sesuai Target
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.94	10.99	100.46%	Melebihi Target
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70.37	70.00	99.47%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	Nilai	0.75	0.93	124%	Melebihi Target

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024

Berdasarkan hasil penilaian di atas, bahwa tingkat capaian untuk empat indikator kinerja sasaran strategis, dengan capaian masing-masing sebesar 100,00% (HLS), 100.46% (RLS), 99.47 Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan 124% (Nilai Pemajuan Kebudayaan Lokal). Dengan demikian maka secara umum Disdikbud Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang urusan pendidikan dan kebudayaan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun dan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja perangkat daerah tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,23	100,49	14.24	100.49	14.25	14.25	100.00
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,92	102,06	10.93	102.05	10.94	10.99	100.46
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	63,63	81,54	69,37	100	70.37	70.00	99.47
3	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	-	-	-	-	0.75	0.93	124.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Balikpapan Tahun 2024

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Indikator : Harapan Lama Sekolah (HLS)

Berdasar hasil penilaian tingkat capaian sasaran strategis masuk kriteria Tercapai/ Sesuai Target, dengan target (HLS) 14.25 tahun, Realisasi 14.25 tahun atau tingkat capaian 100,00% di tahun 2024. Untuk capaian kinerja tahun 2023 sebesar 14.24 tahun, terdapat kenaikan capaian di tahun 2024 sebanyak 0.01 dari tahun sebelumnya, Meskipun demikian, capaian kinerja Tercapai/ Sesuai Target.

Indikator : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Berdasar hasil penilaian tingkat capaian sasaran strategis masuk kriteria Melebihi Target , dengan target (RLS) 10.94 Tahun, Realisasi 10.99 Tahun atau tingkat capaian 100.46%. Realisasi capaian kinerja dari tahun 2023 sebesar 10.93 tahun, terdapat kenaikan capaian di tahun 2024 sebanyak 0.06 dari tahun sebelumnya, Meskipun demikian, capaian kinerja Tercapai/ Sesuai Target.

2.Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tingkat capaian nilai SAKIP pada tahun 2023 sebesar 69,37, hasil penilaian SAKIP 2024 dengan nilai capaian 70.00. terdapat kenaikan penilaian dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0.63 poin

3.Sasaran 3 : Meningkatnya Obyek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Indikator : Nilai pemajuan kebudayaan

Tingkat capaian indikator kinerja mengalami peningkatan di tahun 2024 dari target yang direncanakan 0.75 dengan capaian realisasi realisasi 0.93 melebihi target

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Berikut ini capaian kinerja sasaran dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan:

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	% Realisasi Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun 2026
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.25	14.20	100.35
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.99	10.74	102.33
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70.00	80,63	86.82
3	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Presentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persen	0.93	1.37	67.88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Balikpapan Tahun 2024

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator : Harapan Lama Sekolah (HLS)

Capaian tahun 2024 sebesar 14.25 dengan persentase sebesar 100.35 dari Target akhir tahun (2026) Rencana Strategis yang ditetapkan sebesar 14.20 atau sudah terlampaui di tahun 2024.

Tindak lanjutnya, pada tahun 2025 dilakukan perbaikan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025.

Indikator : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian tahun 2024 sebesar 10.99 dengan persentase sebesar 102.33 % dari Target akhir tahun (2026) Rencana Strategis yang ditetapkan sebesar 10.74 atau sudah terlampaui di tahun 2024.

Tindak lanjutnya, pada tahun 2024 dilakukan perbaikan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025.

b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Evaluasi Akip tahun 2024 telah mencapai 70,00 dengan predikat baik dengan persentase 86.82% dari target akhir tahun (2026) Rencana Strategis yang ditetapkan sebesar 80.63 atau belum melampaui di tahun 2024.

Tindak lanjut, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja perlu disesuaikan lagi antara target Rencana Kerja dan Renstra serta peningkatan SDM dan data pendukung.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Indikator : Nilai Pemajuan Kebudayaan

Capaian kinerja sampai tahun 2024 mencapai 0.93% belum mencapai dari target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 1.37% dari target akhir tahun (2026) Rencana Strategis yang ditetapkan

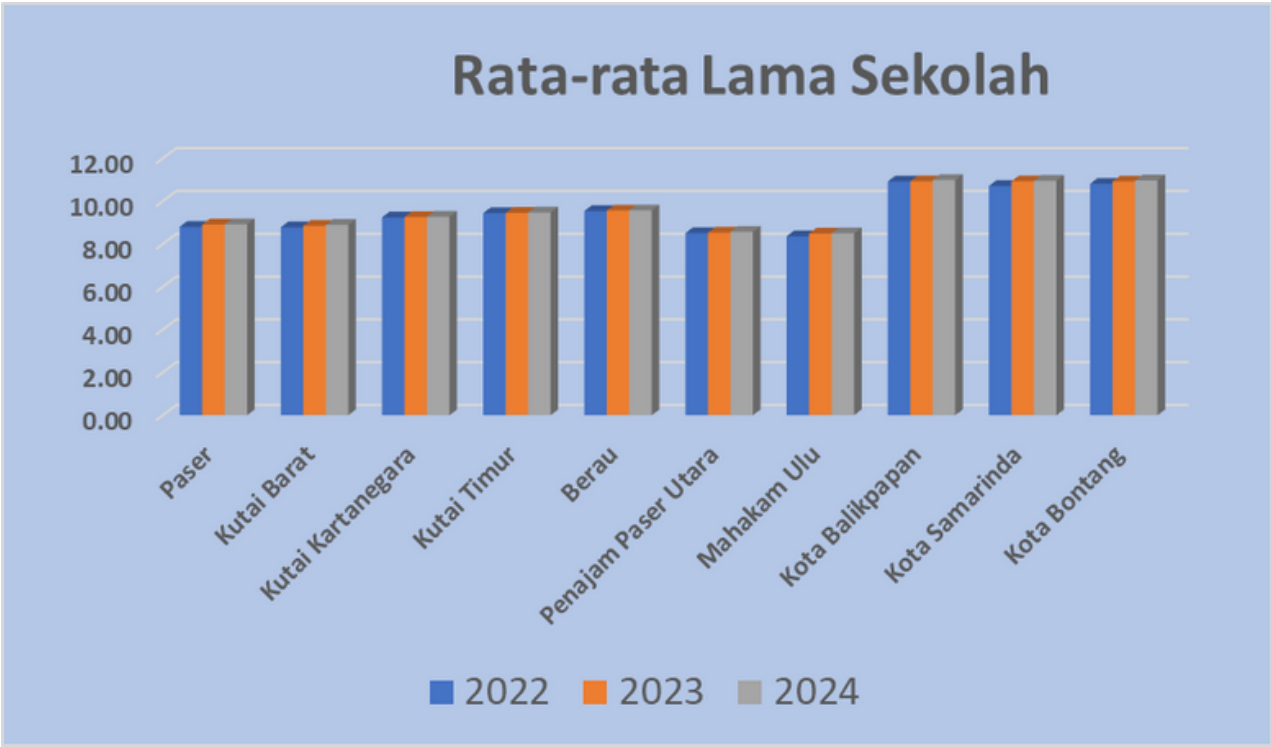
perangkat daerah akan melaksanakan beberapa upaya untuk mendorong keberhasilan capaian di masa mendatang, antara lain :

- Mengoptimalkan pembinaan terhadap SDM maupun organisasi/lembaga Seni Budaya yang tumbuh dan berkembang di Kota Balikpapan, melalui peningkatan kapasitas SDM/lembaga, registrasi/pendataan sanggar seni.

- Mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi/lembaga maupun stakeholder dalam rangka peningkatan event/rapat/seremoni tingkat kota/prov/nasional yang diselenggarakan di Kota Balikpapan.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dengan mengacu pada Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Sekalimantan Timur sebagaimana gambar di bawah ini SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja):



Gambar 3.1
Rata-rata lama Sekolah
Sumber: <https://www.bps.go.id/id>

Berdasarkan gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pencapaian Rata-rata lama Sekolah Kota Balikpapan memiliki pencapaian tertinggi diantara kabupaten/kota yang lain di Kalimantan Timur. Ini menunjukkan bahwa warga Balikpapan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pendidikan.

Tabel 3.7
Rata Rata Lama Sekolah

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
		2022	2023	2024
1	Paser	8.80	8.91	8.92
2	Kutai Barat	8.78	8.85	8.89
3	Kutai Kartanegara	9.24	9.26	9.27
4	Kutai Timur	9.44	9.45	9.47
5	Berau	9.54	9.56	9.57
6	Penajam Paser Utara	8.51	8.53	8.57
7	Mahakam Ulu	8.36	8.49	8.5
8	Kota Balikpapan	10.92	10.93	10.99
9	Kota Samarinda	10.71	10.93	10.95
10	Kota Bontang	10.81	10.92	10.97

Sumber: <https://www.bps.go.id/id>

Berdasarkan Tabel dan Gambar gambar di atas, rata-rata lama sekolah Kota Balikpapan menempati urutan pertama sebesar 10.99 Tahun jika di bandingkan dengan kota yang ada di Kalimantan Timur

Pendidikan yang ditempuh sesuai Rata Lama Sekolah (RLS), menjadi salah satu poin penting dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah pertama selama 3 tahun, dan pendidikan menengah atas selama 3 tahun. Dengan kebijakan ini, artinya RLS yang wajib dipenuhi oleh tiap masyarakat Indonesia adalah selama 12 tahun. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang sudah dicapai/ditempuh.



Gambar 3.2
Harapan Lama Sekolah
Sumber: <https://www.bps.go.id/id>

Berasarkan gambar 3.2 dapat kita lihat bahwa Harapan lama Sekolah di Kota Balikpapan merupakan tertinggi kedua setelah Samarinda. Jika kita lihat dari perolehan Balikpapan, maka warganya telah menyelesaikan Pendidikan hingga Diploma 1.

Tabel 3.8
Harapan Lama Sekolah

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
		2022	2023	2024
1	Paser	13,27	13,37	13,38
2	Kutai Barat	13,09	13,25	13,36
3	Kutai Kartanegara	13,63	13,64	13,65
4	Kutai Timur	13	13,01	13,02
5	Berau	13,35	13,36	13,37
6	Penajam Paser Utara	12,7	12,86	12,87
7	Mahakam Ulu	12,62	12,63	12,78
8	Kota Balikpapan	14,23	14,24	14,25
9	Kota Samarinda	15,1	15,39	15,4
10	Kota Bontang	13,18	13,43	13,73

Sumber: <https://www.bps.go.id/id>

Berdasarkan Tabel dan Gambar gambar di atas, Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan menempati urutan kedua sebesar 14.25 Tahun, di bawah kota Samarinda sebesar 15.40. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. menjadi indikator yang menunjukkan peluang seorang anak dalam menempuh pendidikan.

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (benchmark Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi Daerah 2024	Realisasi Nasional 2024	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.25	14.20	13.21	BPS
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.99	10.02	88.5	BPS
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70.00	n/a	n/a	Rumus perhitungan Berbeda di Tingkat Nasional
3	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Nilai	0.93	n/a	n/a	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

Sumber: <https://www.bps.go.id/id>

Berdasar data pada tabel di atas, perbandingan realisasiasasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap target nasional dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator 1.1. : HarapanLama Sekolah (HLS)

Realisasi HLS Kota Balikpapan tahun 2024 (14.25 tahun) lebih tinggi 1.04 poin dari padarealisasi nasional sebesar 13.15

Indikator 1.2. : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Realisasi RLS Kota Balikpapan tahun 2024 (10.99) lebih tinggi 2.14 poin dari padarealisasi nasional sebesar 8.85

Adapun untuk sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan **Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah :**

Capaian nilai SAKIP PerangkatDaerah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan target nasionalkarena terdapat perbedaan rumus perhitungan.

Sasaran strategis 3 : Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan, dengan indikator : PersentasePemajuan Kebudayaan Lokal tidak dapat diperbandingkan dengan target SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) karena untuk urusan kebudayaan bukan merupakan urusan wajib sehingga tidak termasuk dalam indikator kinerja SPM maupun standar nasional lainnya.

3.2.5 Analisis Penyebab Kenerhasilan /Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilaksanakan

Pada sub bab ini menganalisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dalam rangka pencapaian sasaran yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Predikat		
				Tidak Tercapai (<100%)	Tercapai /Sesuai Target (=100%)	Melebihi Target (>100%)
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	100.00	-	V	-
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	100.46	-	-	V
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.00	V	-	-
3	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan	Presentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	124.00	-	-	V

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2024. (<https://reaksi.balikipapan.go.id/>)

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Dari di atas tabel, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 1 dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan predikat **tercapai/ sesuai target** dengan capaian kinerja 100.00% dan indikator kinerja Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan predikat **melebihi target** dengan capaian kinerja 100.46%.

Hal ini dikarenakan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan program pengelolaan pendidikan serta program pendidik dan tenaga kependidikan cukup tinggi. Komitmen yang dimaksudkan antara lain berupa :

- a. RPJMD Kota Balikpapan (2021-2026) melalui program prioritas/janji Wali Kota yaitu memberikan subsidi SPP dan pengadaan kelengkapan peserta didik/seragam;
- b. Renstra Perangkat Daerah (2021-2026) melalui penyediaan sarpras pendidikan yang memadaiberupa pembangunan unit sekolah baru/USB, pembangunan ruang kelas baru/RKB, rehab sarpras/utilitas satuan pendidikan, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan perlengkapan dasar buku teks dan non teks;
- c. Implementasi Penggunaan TIK dalam pembelajaran maupun layanan (kelas pintar, KSRG, Sistem Layanan Digital bidang pendidikan dan budaya /Sidilandikdaya);
- d. Pengembangan karir SDM PTK jenjang PAUD/SD/SMP/SPNF;
- e. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek/pelatihan/ dan sertifikasi, yaitu : pemberian beasiswa S1 Linier untuk pendidik jenjang PAUD, pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan, fasilitasi komunitas belajar/kombel;
- f. Pelaksanaan pemetaan PTK; dan
- g. Penerapan/implementasi Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Disdikbud Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah :

a. Konsisten dalam menjalankan rencana aksi perangkat daerah, yaitu

peningkatan kompetensi sumberdaya manusia secara kualitas dan kuantitas; peningkatan sarana dan prasarana; pelibatan TIK dalam pembelajaran dan pelayanan, serta kolaborasi dan sinergi.

b. Peningkatan kerja sama/kolaborasi dengan stakeholder/organisasi penggerak/mitra pembangunan/CSR, antara lain :

- I. Stakeholder/organisasi penggerak : Yayasan Teman Kita, Sekolah Alam Depok, Yayasan Tunas Cahaya Bangsa; Yayasan Tunas Cahaya Bangsa adalah yayasan yang menaungi Sekolah Harapan Bangsa Balikpapan, mulai dari PAUD hingga SMA. Yayasan ini juga menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan guru, program Guru Sekolah Karya, yang bertujuan untuk melatih dan menguatkan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal, Program pelatihan dan pengembangan guru, Program untuk memberikan dorongan kepada peserta didik melalui instruksi, motivasi, dan umpan balik positif, Program untuk memberikan praktik langsung dan konsultasi langsung dengan para pelatih.
- II. Mitra Pembangunan : Yayasan Tanoto (2018-sekarang): Merupakan mitra pembangunan bidang pendidikan yang memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam implementasi penerapan digitalisasi sekolah, perencanaan berbasis data Rapor Pendidikan, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa; Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini mengajak para guru untuk mendidik siswa menjadi inovatif, kreatif, produktif, dan mampu berpikir tingkat tinggi serta cinta dan bangga terhadap Indonesia. Walikota juga menyatakan apresiasinya terhadap program PINTAR yang membantu siswa mendapatkan pembelajaran aktif. Tanoto Foundation berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memperbaiki kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah, juga bekerja sama dengan mitra dan masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut.

III. Yayasan Gugah Nurani Indonesia(2021-2024): Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud Bersama Ketua Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GN Indonesia) Setyo Warsono pada 1 September 2021 menandatangani Kesepahaman Bersama No.197/17/KB/IX/2021-GNI/ IDN-0120-08SP-3/ 09/ 2021/ 447 tentang Proyek Pendukung Pembelajaran E-Learning Bagi Guru, Siswa, Orang Tua, Dan Masyarakat di Kota Balikpapan.

Adapun program yang dilaksanakan GNI sejak tahun 2021, antara lain: peningkatan kapasitas guru dengan cakupan sasaran sebanyak 156 guru dari 15 sekolah dasar di Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Timur dan Balikpapan Kota; pembangunan 5 unit e-learning classroom pada 5 lokasi SD (SDN 009 Balikpapan Utara, SDN 011 Balikpapan Utara, SDN 012 Balikpapan Kota, SDN 012 Balikpapan Timur, dan SDN 006 Balikpapan Timur), dan penyediaan media belajar e-learning untuk 15 sekolah, penyediaan akses belajar (LMS Bekawan), pembangunan 3 unit Communitye-Learning Center (CLC) dan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Kendala yang dihadapi Disdikbud Kota Balikpapan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Terbatasnya lahan pemerintah untuk Lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru;
- b. Terbatasnya lahan sekolah untuk direvitalisasi/penambahan Ruang Kelas Baru;
- c. Terbatasnya kuantitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan/sekolah negeri.

Beberapa alternatif solusi/ upaya yang telah dilakukan oleh Disdikbud Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kendala tersebut adalah :

- a. Pengadaan tanah untuk lahan USB, dapat dilakukan dengan melakukan studi kelayakan pada lokasi yang dinilai representatif, memanfaatkan lahan milik pemerintah kota, atau memanfaatkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang/developer perumahan yang diserahkan pemanfaatannya kepada Pemerintah Kota;
- b. Revitalisasi lahan sekolah yang kurang memadai untuk penambahan RKB dengan menggunakan system bangunan bertingkat;
- c. Terbatasnya tenaga pendidik maupun terbatasnya RKB pada beberapa satuan pendidikan dikelola dengan penerapan model pembelajaran di luar ruangandan pengaturan jam belajar menyesuaikan dengan standar pendidikan yang ditentukan pada setiap jenjang; serta
- d. Pengusulan dan Pemenuhan formasi pendidik (PPPK) guna mengatasi permasalahan kekurangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan negeri/ yang berada di bawah pengelolaan pemerintah Kota Balikpapan.

2.Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.10, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah memperlihatkan **capaian dengan tidak tercapai**. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen kepala perangkat daerah dan seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP sebagai berikut :

- a. Adapun kendalanya sampai saat ini untuk pengukuran kinerja masih dilakukan secara manual.
- b. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar;
- c. Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras;
- d. Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
- e. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh satuan pendidikan tentang kebijakan di bidang akuntabilitas;
- f. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta;
- g. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.

3.Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Dari tabel 3.10 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran 3 dengan indikator kinerja Persentase Pemajuan Kebudayaan menunjukkan predikat melebihi target Hal ini dikarenakan :

- a. Peningkatan kapasitas SDM Seni Budaya tahun 2024 melalui Sub Kegiatan Sertifikasi Dan Stantadarisasi SDM Kesenian Tradisional;
- b. Peningkatan event/rapat/seremoni tingkat kota/prov/nasional yang diselenggarakan di Kota Balikpapan, serta optimalisasi pelaksanaan fasilitasi tampilan seni budaya tahun 2024 melalui Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
- c. Optimalisasi pengembangan kebudayaan melalui penyelenggaraan festival/pekan budaya, pelaksanaan kemah budaya dengan melibatkan pramuka Saka Widya Budaya Bhakti, fasilitasi HUT Kota, HUT RI, APEKSI, pembinaan kepada lembaga/yayasan seni budaya;
- d. Optimalisasi pengembangan kesenian tradisional melalui Pemilihan Duta Budaya, peningkatan kapasitas SDM Seni Budaya (Sertifikasi Seni Tari);
- e. Optimalisasi pembinaan sejarah melalui Pembuatan film sejarah Balikpapan dengan melibatkan siswa/pendidik jenjang SD, dan tokoh budayawan Kota Balikpapan; serta

- f. Optimalisasi pelestarian dan pengelolaan cagar budaya melalui pemeliharaan struktur/bangunan/benda Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB) maupun Cagar Budaya (CB); registrasi ODCB, kajian ODCB, dan penetapan ODCB menjadi CB peringkat Kab/Kota, peningkatan kapasitas SDM (bimtek inventarisasi dan pendaftaran ODCB, lawatan Cagar Budaya)
- g. Kolaborasi dan sinergi dengan komunitas, tokoh budayawan/sejarawan Balikpapan, dan stakeholder lainnya (Dewan Kesenian Kota Balikpapan, Forum Paguyuban Kota Balikpapan, Komite Seni Budaya Nusantara/KSBN).

Adapun kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- a. Terbatasnya kuota Sertifikasi SDM Seni Budaya yang disediakan oleh pihak LSP P2 Kebudayaan Kemendikbud;
- b. Sanggar Seni pada satuan pendidikan pada jenjang Paud/SD/SMP/SPNF kurang berkembang, baik dari aspek manajemen, maupun SDM pendukungnya.

Beberapa alternatif solusi/upaya yang telah dilakukan oleh Disdikbud Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kendala tersebut adalah :

- a. Sinergi pelaksanaan sertifikasi SDM Seni Budaya dengan Disdikbud Provinsi Kaltim, Dewan Kesenian Kota Balikpapan maupun stakeholder lainnya
- b. Mengintensifkan sosialisasi/pembinaan manajemen kelembagaan dalam rangka pengembangan sanggar seni pada satuan pendidikan.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel 3.11
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14.25	14.25	100.49
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.94	10.99	100.47
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10.72	10.99	100.52
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	%	87.13	107.45	123.32
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	90.1	105	116.54
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	30.3	28	92.41
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi	%	85.71	68	79.34
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	%	91.95	92.45	100.54
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	71.05	76.08	107.08
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	69,37	70,00	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	87.18	87.07	99.87
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	90.1	105	116.54

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Nilai	87.95	87	98.92
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	82.99	86.93	104.75
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	86.43	87.04	100.71
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	86.21	87.28	101.24
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	87.24	87.14	99.89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83.47	86.93	104.15
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	%	0.75	0.93	124
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	55.1	90	163.34
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	40	40	100
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	83.64	83	99.23
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	41.67	44	105.59
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	34.83	44	126.33
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	50	50	100
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	%	46.67	66	141.42

3	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	66.67	75	112.49
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	97.06	96	98.91
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	97.06	85	87.57
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	21.43	83	387.31

Sumber: Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Balikpapan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait upaya peningkatan kualitas SDM di Disdikbud Kota Balikpapan:

Fokus pada Peningkatan Kualitas Pendidik:

- Disdikbud Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai program, salah satunya adalah mendorong para guru untuk mengikuti sertifikasi.
- Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui Pendampingan Profesi Guru (PPG).
- Selain itu, juga dilakukan pelatihan dan diklat serta memberikan informasi teknologi.

Rencana Aksi Peningkatan SDM:

- Disdikbud Kota Balikpapan telah mencanangkan empat rencana aksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang mencakup peningkatan SDM pendidik dan peserta didik.
- Peningkatan SDM ini dilakukan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Pemerintah Kota Balikpapan juga mempercepat proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Peningkatan Fasilitas dan Sarana Prasarana:

- a. Selain peningkatan SDM, Disdikbud Kota Balikpapan juga fokus pada peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di dunia pendidikan.
- b. Anggaran yang signifikan dialokasikan setiap tahun untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah di Kota Balikpapan.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan.

Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Disdikbud Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas SDM, baik dari segi pendidik maupun peserta didik, serta peningkatan fasilitas pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.

Adapun program/kegiatan yang menunjang pada pencapaian target di antaranya:

a) Program Pengelolaan Pendidikan

Program dilaksanakan oleh 3 bidang, yaitu Bidang Pendidikan SD, Bidang Pendidikan SMP dan Bidang PAUD dan DIKMAS. Kegiatan yang dilaksanakan masing-masing bidang untuk mendukung program yaitu :

I. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar yang bertanggung jawab terhadap mutu pembelajaran jenjang sekolah dasar di Kota Balikpapan. Peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan menjadi fokus utama untuk mencapai mutu pembelajaran yang lebih baik.

Untuk meningkatkan daya tampung di sekolah dasar dilakukan Pembangunan ruang kelas baru di beberapa sekolah yang tersebar di 6 Kecamatan. Di Kecamatan Balikpapan Barat Pembangunan ruang kelas baru dilaksanakan di SD Negeri 020 Balikpapan Barat. Sekolah yang juga merupakan sekolah negeri pertama di Kota Balikpapan yang mendapatkan predikat Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG) ini mendapatkan tambahan ruang kelas baru. Selain itu di Kecamatan Balikpapan Utara tepatnya di SD negeri 030 Balikpapan Utara juga mendapatkan penambahan ruang kelas baru. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah yang berada di Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Kelurahan yang merupakan pemekaran dari Kelurahan Gunung Samarinda. Padatnya penduduk dan banyaknya perumahan yang dibangun membuat banyak anak usia sekolah dasar yang tiap tahun tidak tertampung. Sehingga diharapkan dengan penambahan ruang kelas baru ini dapat menambah daya tampung di sekolah tersebut.

Untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi di jenjang sekolah dasar. Disdikbud Kota Balikpapan juga menyalurkan perangkat TIK untuk satuan pendidikan. Perangkat TIK seperti Chromebook dan papan Interaktif terus diberikan kepada satuan pendidikan yang ada di Kota Balikpapan Transformasi digital yang juga merupakan program Pemerintah pusat ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi pendidik dan peserta didik.

Peningkatan kapasitas pendidikan juga dilakukan agar pembelajaran makin aktif, kreatif dan inovatif. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik tentang pembuatan konten digital, penulisan buku guru dan siswa serta mengikutkan pendidik dalam program peningkatan kapasitas pendidik oleh pemerintah pusat.

Pendampingan terhadap satuan pendidikan juga dilakukan. Pendampingan dan penyusunan Perencanaan Berbasis Data dengan memanfaatkan Raport Pendidikan. Pendampingan pemanfaatan Dana BOSP, BOS Kinerja dan BOSDA.

II. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Terobosan besar dilakukan oleh Bidang Pendidikan Sekolah Menengah. Untuk dapat meningkatkan daya tampung lulusan sekolah dasar di sekolah menengah pertama. Dalam rangka meningkatkan daya tampung tersebut maka ditempuh kebijakan dengan membangun Unit Sekolah Baru. Beberapa sekolah baru berhasil dibangun untuk meningkatkan daya tampung siswa. Pembangunan SMP Negeri 27 Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Tengah dan SMP negeri 28 Balikpapan di Kecamatan Balikpapan Timur.

Pembangunan 2 unit sekolah baru tadi diharapkan mampu meningkatkan prosentase daya tampung lulusan sekolah dasar. Selama ini lulusan sekolah dasar yang tertampung di sekolah negeri berada di angka 65% dari jumlah lulusan. Setiap tahun jumlah lulusan sekolah dasar di Balikpapan berada di angka sepuluh ribu hingga dua belas ribu siswa. Berarti masih ada kurang lebih empat ribu hingga lima ribu yang belum tertampung.

Selain menambah Unit Sekolah Baru juga dilakukan Pembangunan ruang kelas baru. Jika Pembangunan unit sekolah baru dilakukan dengan membangun sekolah baru ditempat yang baru. Pembangunan Ruang Kelas Baru adalah membangun Gedung baru di sekolah yang sudah ada. Dengan adanya pembangunan kelas baru di sekolah yang sudah ada maka juga menambah daya tampung siswa.

Transformasi Digital juga dijalankan di jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Program transformasi digital yang juga merupakan salah satu program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan ini dijalankan juga.

Program Kelas Pintar merupakan program pendampingan untuk menyiapkan satuan pendidikan terbiasa dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Selain itu program pemberian bantuan peralatan TIK di satuan pendidikan juga terus digalakkan.

Untuk mendukung pemanfaatan peralatan TIK yang sudah disalurkan ke satuan pendidikan diambil program Kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu Kerjasama itu dilakukan dengan Google For Education Indonesia. Kerjasama ini melahirkan program Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG). KSRG adalah program pendampingan pemanfaatan akun belajar.id, chromebook dan Google Workspace for Education (GWfE).

Peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan satuan pendidikan juga dijalankan. Peningkatan kapasitas peserta didik melalui kegiatan lomba-lomba seperti OSN, O2SN, FLS2N dan Lomba-lomba Bidang Olah Raga. Pendampingan pendidik dilakukan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan Guru Penggerak, Pelatihan Pemanfaatan Chromebook, dan Google Workspace for Education. Bahkan pendidik juga dilatih untuk membuat konten-konten digital dalam pembelajaran.

Sementara itu satuan pendidikan juga dilakukan pendampingan dalam mengelola pembelajaran yang berkualitas. Pendampingan pengelolaan Dana BOSP, BOS Kinerja dan BOSDA. Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah dan pengelola keuangan di satuan pendidikan.

III. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini adalah Fase Pondasi yang harus mendapatkan perhatian lebih. Masih banyak Masyarakat yang belum menyadari pentingnya Pendidikan di fase ini. Banyak terobosan yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Anak Usia Dini untuk mengadvokasi Masyarakat.

Berbagai kebijakan dijalankan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah jenjang PAUD yang masih rendah. Pemberian SPP gratis, seragam gratis dilakukan untuk menarik perhatian Masyarakat dan mau menyekolahkan anak mereka di jenjang PAUD. Terbukti kebijakan ini mampu menaikkan Angka Partisipasi Sekolah di jenjang PAUD. Pendampingan terhadap Lembaga satuan Pendidikan juga terus dilakukan sehingga pengelolaannya makin baik. Program pembinaan kelembagaan seperti pengelolaan data pokok Pendidikan, pengelolaan dana-dana bantuan serta peningkatan kapasitas Kepala Sekolah. Peningkatan kapasitas pendidik juga dilakukan dengan memberikan biasiswa kepada pendidik yang belum D4/Si. Selain itu juga ada peningkatan kapasitas pendidik dalam pengelolaan pembelajaran. Program peningkatan kapasitas seperti Guru Penggerak, Sekolah Penggerak dan Organisasi Penggerak juga mendukung program-program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Program kolaborasi dan sinergi juga terus dijalankan seperti program PAUD HI dan POKJA Bunda PAUD. Peran kedua program ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan di fase pondasi. Peran POKJA Bunda PAUD yang terus melakukan sosialisai dengan warga mampu mengedukasi dan mengadvokasi Masyarakat dengan baik.

IV. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan di Kota Balikpapan merupakan upaya penting dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pengelolaan dan pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan di kota ini:

1. Lembaga Penyelenggara:

- a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):
PKBM berperan sebagai pusat penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal, termasuk program kesetaraan (Paket A, B, dan C). PKBM juga menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Satuan Kegiatan Belajar (SKB):
SKB juga berperan penting dalam penyelenggaraan program pendidikan non formal.
SKB di kota Balikpapan juga terus meningkatkan kualitas layanannya.
- c. Lembaga lainnya:
Selain PKBM dan SKB, terdapat lembaga-lembaga lain yang juga menyelenggarakan program pendidikan nonformal, seperti lembaga pelatihan keterampilan swasta dan organisasi masyarakat.

2. Program Pendidikan Nonformal/Kesetaraan:

- a. Program Kesetaraan (Paket A, B, dan C):
Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal untuk memperoleh ijazah setara SD, SMP, dan SMA. Program ini sangat penting dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan memberikan kesempatan kerja yang lebih baik.
- b. Pelatihan Keterampilan:
Berbagai pelatihan keterampilan diselenggarakan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang, seperti menjahit, tata rias, perbengkelan, komputer, dan bahasa asing.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat:
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan keuangan, dan pelatihan kewirausahaan.

2. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan:

- a. Pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penyelenggara, dan masyarakat.
- b. Perlengkapan yang dibutuhkan mencakup:
 1. Buku dan bahan ajar.
 2. Alat tulis dan perlengkapan belajar lainnya.
 3. Peralatan praktik untuk pelatihan keterampilan.
 4. Fasilitas pendukung, seperti komputer dan akses internet.
- c. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan anggaran dan fasilitas pendukung untuk program pendidikan nonformal/kesetaraan.
- d. Lembaga penyelenggara juga berupaya mencari sumber pendanaan lain, seperti dari donatur dan kerjasama dengan dunia usaha.

b) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan bertanggung jawab terhadap pemetaan dan penempatan Guru dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan karir Guru dan Tenaga kependidikan melalui program-program nasional maupun daerah. Program pengembangan karir ditempuh dengan melibatkan Lembaga Balai Pengembangan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru Penggerak (BGP) Kalimantan Timur. Selain itu juga melibatkan pihak-pihak lain seperti KDOP LAN Samarinda dan pihak ke 3 seperti Tanoto Foundation dan Gugah Nurani Indonesia.

Program Pendidikan Guru Penggerak merupakan kegiatan peningkatan kompetensi guru jenjang PAUD, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh BGP Kalimantan Timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas guru dalam pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan satuan Pendidikan. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam hal ini Bidang GTK adalah sebagai Panitia Lokal yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara kegiatan. Program ini dilaksanakan selama 6 bulan secara daring dan luring. Program pembinaan secara blended learning dengan memanfaatkan Learning Manajemen System (LMS). LMS yang digunakan adalah Sistem Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (Sim PKB).

Guru lulusan program Guru Penggerak disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan juga sebagai Calon Kepala Sekolah. Program Guru Penggerak telah diikuti oleh Disdikbud Kota Balikpapan sejak Angkatan 2 sampai dengan Angkatan 12. Jumlah Guru Penggerak di Kota Balikpapan saat ini sebanyak 205 orang dan telah diangkat menjadi Kepala Sekolah sebanyak 14 orang dan Plt Kepala Sekolah sebanyak 13 orang.

Bidang GTK juga menjalin Kerjasama dengan KDOD LAN Samarinda dalam meningkatkan kapasitas Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP.

Program ini adalah Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah. Edukasi dan advokasi dalam meningkatkan manajemen pengelolaan satuan Pendidikan. Membantu Kepala Sekolah membuat sebuah inovasi yang bisa menjadi branding satuan Pendidikan. Sekolah Idaman adalah program yang dihasilkan dari kegiatan ini. Sekolah Idaman menjadi tempat untuk menempa Kepala Sekolah menciptakan sebuah inovasi pembelajaran. Sehingga sekolah mampu menghadirkan pembelajaran yang aktif, kreatif dan inovatif.

Selain itu peserta dari program pendampingan ini juga diberikan kesempatan untuk beradu gagasan dengan peserta lain. Sehingga gagasan atau karya inovatif yang dihasilkan dapat menjadi praktik baik bagi peserta lain.

Peningkatan Kapasitas pendidik juga dilakukan oleh Bidang GTK dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik di Balikpapan. Program yang dijalankan adalah Guru Penggerak Bertunas. Program ini merupakan berbagi praktik baik antara guru penggerak dengan guru-guru yang ada di Kota Balikpapan.

Guru Penggerak bertunas diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran di satuan Pendidikan. Dengan cara membagikan praktik baik pembelajaran yang diterima oleh guru penggerak selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sehingga hal ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Satuan Pendidikan dapat juga merasakan dampak dari adanya program guru penggerak meskipun guru disekolah tersebut belum ada yang lolos seleksi.

Pemetaan bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) adalah sebuah proses sistematis dan komprehensif yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data serta informasi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan GTK dalam suatu wilayah atau lingkup pendidikan tertentu. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat tentang kondisi riil GTK, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Fokus Utama Pemetaan:

1. Distribusi: Bagaimana persebaran GTK antar wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan), jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP), dan jenis sekolah (negeri, swasta). Hal ini mencakup identifikasi daerah kekurangan atau kelebihan GTK.
2. Kualifikasi Akademik: Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh GTK (misalnya, SMA/SMK, D3, S1, S2, S3). Pemetaan ini membantu mengidentifikasi proporsi GTK yang telah memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.
3. Kompetensi: Tingkat penguasaan GTK terhadap kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pemetaan ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti asesmen, evaluasi kinerja, atau analisis data sertifikasi.
4. Sertifikasi Pendidik: Status kepemilikan sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan profesionalisme guru. Pemetaan ini menunjukkan proporsi guru yang telah tersertifikasi.
5. Beban Kerja: Jumlah jam mengajar, tugas tambahan (misalnya, wali kelas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah), dan tanggung jawab lain yang diemban oleh GTK. Pemetaan ini penting untuk memastikan beban kerja yang proporsional.
6. Kinerja: Hasil evaluasi kinerja GTK berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pemetaan ini memberikan gambaran tentang kualitas kinerja GTK secara keseluruhan.
7. Kebutuhan dan Kekurangan: Identifikasi jumlah dan jenis GTK yang dibutuhkan di berbagai wilayah dan jenjang pendidikan, termasuk spesifikasi mata pelajaran atau bidang keahlian. Pemetaan ini menjadi dasar perencanaan rekrutmen dan penempatan.
8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB): Partisipasi GTK dalam berbagai kegiatan PKB, seperti pelatihan, seminar, workshop, dan studi lanjut. Pemetaan ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kebutuhan akan program PKB.
9. Data Demografi: Informasi mengenai usia, jenis kelamin, status kepegawaian (PNS, PPPK, GTY/GTT), dan masa kerja GTK. Data ini penting untuk perencanaan karir dan proyeksi kebutuhan di masa depan (misalnya, perkiraan pensiun).
10. Sarana dan Prasarana Pendukung: Meskipun fokus utama pada GTK, pemetaan juga dapat mencakup informasi terkait ketersediaan dan kondisi sarana prasarana yang mendukung kinerja GTK.

Proses Pelaksanaan Pemetaan:

Pemetaan GTK melibatkan serangkaian tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan Data: Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik), survei, kuesioner, data kepegawaian dari dinas pendidikan atau Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hasil asesmen kompetensi, dan data sertifikasi.
2. Verifikasi dan Validasi Data: Data yang terkumpul perlu diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya.
3. Analisis Data: Data yang telah valid dianalisis menggunakan metode statistik dan teknik analisis lainnya untuk mengidentifikasi pola, tren, kesenjangan, dan kebutuhan terkait GTK.
4. Penyajian Data: Hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan, tabel, grafik, peta, atau visualisasi data lainnya agar mudah dipahami dan digunakan oleh para pemangku kepentingan.
5. Diseminasi Informasi: Hasil pemetaan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, organisasi profesi guru, dan GTK itu sendiri.
6. Tindak Lanjut: Hasil pemetaan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan, menyusun program pengembangan GTK, melakukan perencanaan rekrutmen dan penempatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program.

Tujuan Utama Pemetaan (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya):

1. Mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang kondisi GTK.
2. Menyediakan data dan informasi yang valid untuk pengambilan keputusan strategis.
3. Mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi riil GTK.
4. Menganalisis potensi dan tantangan dalam pengembangan GTK.

Dengan demikian, pemetaan bidang GTK adalah sebuah instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Hasil dari pemetaan ini menjadi landasan krusial bagi upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan melalui penyediaan GTK yang kompeten, profesional, dan terdistribusi secara adil.

2.Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran strategis ini memiliki arti bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang telah dicapai oleh seluruh unit kerja dan individu di dalam organisasi tersebut. Peningkatan ini diharapkan mencakup berbagai aspek akuntabilitas, seperti:

- a. Transparansi:** Keterbukaan dalam penyampaian informasi kinerja kepada pihak pihak yang berkepentingan. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berupaya untuk terbuka dalam pengelolaan maupun pengembangan. Keterbukaan ini dapat dilihat dari dibukanya berbagai macam kanal informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Mulai dari informasi tentang data sekolah, data guru, data siswa dan data program serta kinerjanya. Dengan membuka website dan akun sosial media Dinas Pendidikan kita akan disajikan berbagai macam informasi tentang program dan capaian kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
- b. Responsibilitas:** Kesiediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kinerja yang telah dilakukan. Sebagai perangkat daerah yang melayani kebutuhan dasar masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Balikpapan juga membuka kanal pengaduan yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Selain menggunakan kanal pengaduan resmi juga membuka layanan pengaduan melalui media sosial, Kanal-kanal pengaduan ini dapat diakses 24 jam dan akan mendapatkan layanan yang responsif.
- c. Efektivitas:** Pencapaian tujuan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Pendidikan juga berupaya untuk secara rutin melakukan evaluasinya. Dengan membuat laporan bulanan dan tiga bulanan sebagai pengukuran terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
- d. Efisiensi:** Penggunaan sumber daya secara optimal dalam mencapai kinerja. Dalam penyusunan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Balikpapan juga melakukan efisiensi anggaran. Dengan banyaknya unit-unit kerja yang ditangani maka efisiensi ini dilakukan agar semua kegiatan menjadi tepat sasaran. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerjanya.
- e. Kesesuaian dengan Peraturan:** Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tingkat kesesuaian dengan peraturan yang lebih baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat melakukan berbagai upaya, antara lain:
 - Sosialisasi dan Pemahaman Peraturan: Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka melalui pelatihan, workshop, dan penyediaan akses mudah ke dokumen peraturan.

- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP): Mengembangkan SOP yang jelas dan terperinci berdasarkan peraturan yang berlaku untuk setiap proses kerja utama.
- Internalisasi Nilai Kepatuhan: Membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan sebagai bagian integral dari etos kerja.
- Pengawasan dan Pengendalian Internal: Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan.
- Audit Kepatuhan: Melakukan audit kepatuhan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan.
- Tindak Lanjut Temuan Audit: Menindaklanjuti temuan audit dengan tindakan korektif dan preventif yang efektif.
- Konsultasi Hukum: Membangun kerjasama dengan ahli hukum untuk mendapatkan nasihat dan interpretasi yang tepat terkait peraturan yang kompleks.
- Transparansi Regulasi: Menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Kesesuaian dengan peraturan merupakan fondasi penting bagi akuntabilitas kinerja. Instansi yang tidak patuh terhadap peraturan akan sulit dipertanggungjawabkan kinerjanya secara sah dan kredibel. Dengan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerjanya secara keseluruhan.

Dengan ditetapkannya sasaran strategis ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan diharapkan akan melakukan berbagai upaya dan program kerja yang mendukung tercapainya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Beberapa contoh implikasinya adalah:

- a. Penyusunan dan implementasi sistem pengukuran kinerja yang jelas dan terukur.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
- c. Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja.
- d. Peningkatan transparansi melalui publikasi informasi kinerja.
- e. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja.
- f. Penerapan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi.

Sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan" merupakan pernyataan komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan pertanggungjawaban kinerja dalam organisasi tersebut. Pencapaian sasaran ini diharapkan akan berdampak positif pada efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Sub Bagian Umum, meskipun seringkali dianggap sebagai unit pendukung, memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan akuntabilitas kinerja. Kegiatan-kegiatan yang diampunya dapat secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada tercapainya sasaran strategis tersebut.

Pengelolaan Administrasi Umum dan Tata Persuratan: Kontribusi: Sistem administrasi dan tata persuratan yang baik memastikan semua dokumen penting tercatat, tersip dengan rapi, dan mudah diakses. Hal ini penting untuk transparansi dan pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan tindakan. Proses disposisi surat yang jelas juga memastikan responsibilitas dalam menindaklanjuti berbagai hal.

Keterkaitan dengan Kesesuaian Peraturan: Pengelolaan dokumen yang sesuai dengan standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan adalah wujud kesesuaian dengan peraturan.

Pengelolaan Kepegawaian: Kontribusi: Administrasi kepegawaian yang tertib, termasuk data kinerja pegawai, catatan disiplin, dan pengembangan kompetensi, menjadi dasar untuk evaluasi kinerja yang objektif dan adil. Ini mendukung pengukuran kinerja yang lebih baik dan pertanggungjawaban individu atas hasil kerjanya.

Keterkaitan dengan Kesesuaian Peraturan: Pengelolaan kepegawaian harus sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, termasuk dalam hal promosi, mutasi, disiplin, dan hak-hak pegawai.

Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan: Pengelolaan anggaran dan aset yang transparan dan akuntabel adalah fondasi utama akuntabilitas kinerja. Sub Bagian Umum berperan dalam administrasi pengadaan, inventarisasi, dan pemeliharaan aset, serta membantu dalam pengelolaan keuangan rutin. Penggunaan sumber daya yang efisien berkontribusi pada efisiensi kinerja. Pelaporan keuangan yang akurat mendukung transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Keterkaitan dengan Kesesuaian Peraturan: Pengelolaan keuangan dan aset harus sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dan barang milik daerah.

Pelayanan Umum dan Kerumahtanggaan: Penyediaan fasilitas dan layanan pendukung yang baik (misalnya, ruang kerja yang layak, peralatan kantor yang berfungsi, layanan kebersihan) menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Hal ini secara tidak langsung mendukung efektivitas kinerja.

Keterkaitan dengan Kesesuaian Peraturan: Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kantor harus dilakukan sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tingkat Dasar: Sub Bagian Umum juga mengelola infrastruktur TIK dasar, ketersediaan sistem informasi yang handal dapat mendukung proses kerja yang lebih efisien dan transparan, serta mempermudah pelaporan kinerja. Ini berkontribusi pada efisiensi dan transparansi.

Keterkaitan dengan Kesesuaian Peraturan: Pengelolaan data dan informasi, termasuk penggunaan sistem elektronik, harus memperhatikan peraturan terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

3.Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan

Sasaran strategis ini memiliki arti bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan upaya-upaya dalam memajukan kebudayaan lokal yang ada di Kota Balikpapan, dengan penekanan pada aspek pelestariannya. Peningkatan ini akan diwujudkan melalui berbagai program pengembangan kebudayaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh dinas terkait.

- a. Dengan ditetapkan sasaran strategis ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan diharapkan akan merancang dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk:
 - b. Inventarisasi dan Dokumentasi: Mengidentifikasi, mencatat, dan mendokumentasikan berbagai aspek kebudayaan lokal (misalnya, seni pertunjukan, bahasa, tradisi, pengetahuan tradisional, cagar budaya).
 - c. Pelindungan: Melakukan upaya perlindungan terhadap objek dan ekspresi kebudayaan lokal dari kerusakan, kepunahan, atau penyalahgunaan.
 - d. Pengembangan: Meningkatkan kualitas, kreativitas, dan inovasi dalam praktik kebudayaan lokal agar tetap relevan dan menarik bagi generasi sekarang dan mendatang.
 - e. Pemanfaatan: Mendorong pemanfaatan kebudayaan lokal untuk berbagai tujuan positif, seperti pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan memperkuat identitas lokal.
 - f. Pembinaan: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal, termasuk seniman, budayawan, dan komunitas.
 - g. Penyebarluasan: Mengkomunikasikan dan mempromosikan kebudayaan lokal kepada masyarakat luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
 - h. Kemitraan: Membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti komunitas budaya, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah daerah/pusat.
- Contoh Program Pengembangan Kebudayaan yang Mungkin Dilaksanakan:

Untuk mencapai sasaran strategis ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat melaksanakan berbagai program, di antaranya:

- a. Festival seni dan budaya lokal.
- b. Pelatihan dan workshop untuk seniman dan pengrajin lokal.
- c. Program revitalisasi bahasa daerah.
- d. Pengembangan museum dan pusat informasi kebudayaan.
- e. Pemberian dukungan kepada komunitas budaya.
- f. Penyelenggaraan seminar dan diskusi tentang kebudayaan lokal.
- g. Pengembangan konten digital tentang kebudayaan lokal.
- h. Program pertukaran budaya.
- i. Pengintegrasian muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.

Sasaran strategis ini memiliki arti bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan upaya-upaya dalam memajukan kebudayaan lokal di Kota Balikpapan, dengan memberikan perhatian khusus pada pengembangan kesenian tradisional sebagai sarana utama. Upaya pemajuan ini harus dilakukan dengan tetap memprioritaskan pelestarian nilai-nilai dan bentuk-bentuk kesenian tradisional agar tidak punah dan tetap relevan.

Dengan ditetapkannya sasaran strategis ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan diharapkan akan merancang dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara spesifik berfokus pada pengembangan kesenian tradisional, dengan tujuan untuk:

- a. Inventarisasi dan Dokumentasi Kesenian Tradisional: Mengidentifikasi, mencatat, merekam, dan mengarsipkan berbagai jenis kesenian tradisional yang ada di Kota Balikpapan (misalnya, tarian, musik, teater, seni rupa tradisional).
- b. Pelindungan dan Pelestarian Kesenian Tradisional: Melakukan upaya perlindungan terhadap bentuk-bentuk kesenian tradisional yang terancam punah, termasuk pewarisan kepada generasi muda.
- c. Pengembangan Kreativitas dalam Kesenian Tradisional: Mendorong inovasi dan adaptasi dalam kesenian tradisional agar tetap menarik dan relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi tradisionalnya.
- d. Pemanfaatan Kesenian Tradisional: Mempromosikan dan memanfaatkan kesenian tradisional untuk berbagai tujuan, seperti pendidikan, pariwisata, acara budaya, dan pengembangan ekonomi kreatif.
- e. Pembinaan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesenian Tradisional: Meningkatkan kapasitas para pelaku seni tradisional, termasuk seniman, pengrajin, dan instruktur.
- f. Penyebarluasan dan Promosi Kesenian Tradisional: Mengkomunikasikan dan mempromosikan kesenian tradisional kepada masyarakat luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- g. Pendidikan dan Pewarisan Kesenian Tradisional: Mengintegrasikan pembelajaran tentang kesenian tradisional dalam sistem pendidikan formal dan non-formal untuk memastikan generasi muda mengenal dan melestarikannya.

- h. Dukungan kepada Komunitas Seni Tradisional: Memberikan dukungan moril dan materiil kepada kelompok-kelompok atau sanggar seni tradisional.
- i. Penyelenggaraan Festival dan Pertunjukan Kesenian Tradisional: Mengadakan acara-acara yang menampilkan kekayaan kesenian tradisional Kota Balikpapan.

Perbedaan utama dengan sasaran strategis sebelumnya adalah penekanan yang lebih spesifik pada kesenian tradisional. Ini mengindikasikan bahwa dinas akan memprioritaskan program-program yang secara langsung berhubungan dengan pengembangan dan pelestarian berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari kebudayaan lokal Kota Balikpapan.

Dalam konteks kesenian tradisional, pemajuan dapat berarti meningkatkan kualitas pertunjukan, memperluas jangkauan apresiasi, atau mengembangkan aspek ekonomi kreatifnya. Namun, hal ini harus dilakukan dengan tetap menjaga keaslian bentuk, makna, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian tradisional tersebut. Pelestarian menjadi landasan agar pemajuan tidak menghilangkan identitas dan warisan budaya yang berharga.

Sasaran strategis "Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan melalui Program Pengembangan Kesenian Tradisional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan" menunjukkan fokus yang lebih tajam pada peran kesenian tradisional dalam memajukan dan melestarikan kebudayaan lokal. Keberhasilan sasaran ini akan sangat bergantung pada efektivitas program-program yang secara spesifik dirancang untuk mengembangkan potensi dan menjaga keberlangsungan kesenian tradisional di Kota Balikpapan.

Sasaran strategis ini memiliki arti bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan upaya-upaya dalam memajukan kebudayaan lokal di Kota Balikpapan, dengan memberikan perhatian khusus pada program-program yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman, pelestarian, dan pemanfaatan sejarah lokal sebagai bagian integral dari kebudayaan. Upaya pemajuan ini harus dilakukan dengan tetap memprioritaskan pelestarian catatan, artefak, dan narasi sejarah agar menjadi fondasi yang kokoh bagi identitas budaya.

Dengan ditetapkannya sasaran strategis ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan diharapkan akan merancang dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara spesifik berfokus pada pembinaan sejarah lokal, dengan tujuan untuk:

- a. Penelitian dan Dokumentasi Sejarah Lokal:** Melakukan penelitian mendalam tentang berbagai aspek sejarah Kota Balikpapan, termasuk sejarah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Mendokumentasikan temuan penelitian dalam berbagai bentuk (tulisan, audio, visual).
- b. Pelindungan dan Pelestarian Cagar Budaya dan Artefak Sejarah:** Mengidentifikasi, melindungi, dan melestarikan situs-situs bersejarah, bangunan kuno, artefak, dan benda-benda lain yang memiliki nilai sejarah lokal.

- c. Pengembangan Materi Pembelajaran Sejarah Lokal:** Menyusun materi pembelajaran yang akurat dan menarik tentang sejarah lokal untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal.
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi Sejarah:** Mengadakan seminar, workshop, diskusi, pameran, dan kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah lokal.
- e. Pemanfaatan Sejarah untuk Pengembangan Pariwisata Budaya:** Mengembangkan potensi situs-situs bersejarah dan narasi sejarah lokal sebagai daya tarik wisata budaya.
- f. Pembinaan Komunitas Sejarah Lokal:** Mendukung dan memberdayakan komunitas-komunitas yang memiliki minat dan fokus pada pelestarian sejarah lokal.
- g. Pengembangan Media Informasi Sejarah Lokal:** Membuat konten-konten informatif tentang sejarah lokal melalui berbagai media (website, media sosial, publikasi).
- h. Pengintegrasian Sejarah Lokal dalam Kegiatan Budaya:** Menghubungkan narasi sejarah dengan berbagai bentuk ekspresi budaya lokal lainnya (seni pertunjukan, tradisi).
- i. Pewarisan Nilai-Nilai Sejarah Lokal:** Mendorong pemahaman tentang nilai nilai yang terkandung dalam sejarah lokal dan relevansinya dengan kehidupan masa kini.

Perbedaan utama dengan sasaran strategis sebelumnya adalah penekanan yang lebih spesifik pada pembinaan sejarah. Ini mengindikasikan bahwa dinas akan memprioritaskan program-program yang secara langsung berhubungan dengan penggalan, pelestarian, penyebarluasan, dan pemanfaatan pengetahuan tentang sejarah lokal sebagai fondasi penting bagi pemajuan kebudayaan.

Dalam konteks ini, pemajuan kebudayaan lokal didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang akar sejarahnya. Pelestarian catatan dan bukti sejarah menjadi krusial agar narasi budaya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Program pembinaan sejarah yang efektif akan memperkuat identitas lokal dan memberikan konteks yang lebih kaya bagi pengembangan aspek-aspek kebudayaan lainnya.

Sasaran strategis "Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan melalui Program Pembinaan Sejarah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan" menunjukkan pengakuan akan pentingnya sejarah sebagai landasan bagi pemajuan kebudayaan lokal. Keberhasilan sasaran ini akan sangat bergantung pada kemampuan dinas dalam merancang dan melaksanakan program-program pembinaan sejarah yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan mampu meningkatkan kesadaran serta apresiasi masyarakat terhadap warisan sejarah Kota Balikpapan.

Tentu, mari kita analisis sasaran strategis: Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan melalui Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

- a. Subjek:** Pemajuan Kebudayaan Lokal. Fokus utama sasaran ini adalah peningkatan aspek-aspek positif dari kebudayaan lokal.
- b. Kondisi yang Diharapkan:** Meningkatnya. Menunjukkan adanya target untuk meningkatkan kesadaran, apresiasi, pemanfaatan, atau aspek positif lainnya terkait pemajuan kebudayaan lokal.
- c. Aspek Kebudayaan yang Ditekankan:** Yang Dilestarikan. Menggarisbawahi bahwa upaya pemajuan harus sejalan dengan pelestarian elemen-elemen penting dari kebudayaan lokal, dalam hal ini secara spesifik cagar budaya.
- d. Instrumen Pencapaian Spesifik:** Melalui Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Ini mempersempit fokus program pengembangan kebudayaan menjadi secara khusus pada upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagai alat utama untuk mencapai sasaran strategis.
- e. Lokasi:** Kota Balikpapan. Menentukan wilayah geografis berlakunya sasaran strategis ini.

Sasaran strategis ini memiliki arti bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan upaya-upaya dalam memajukan kebudayaan lokal di Kota Balikpapan, dengan memberikan perhatian khusus pada program-program yang bertujuan untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya yang ada. Upaya pemajuan ini didasarkan pada asumsi bahwa cagar budaya merupakan aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Dengan ditetapkannya sasaran strategis ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan diharapkan akan merancang dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara spesifik berfokus pada pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, dengan tujuan untuk:

- a. Identifikasi dan Penetapan Cagar Budaya:** Melakukan inventarisasi dan kajian untuk menetapkan bangunan, situs, struktur, benda, kawasan, atau lanskap yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan sebagai cagar budaya.
- b. Pelindungan Cagar Budaya:** Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan, kehancuran, atau kehilangan cagar budaya. Ini termasuk pengamanan fisik, pemeliharaan, dan konservasi.
- c. Pengelolaan Cagar Budaya:** Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

- d. Pengembangan Potensi Cagar Budaya:** Mengembangkan potensi cagar budaya untuk kepentingan pendidikan, pariwisata budaya, dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai pelestariannya.
- e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya cagar budaya melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi.
- f. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat, komunitas lokal, ahli, dan pihak terkait lainnya dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
- g. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi:** Memperkuat kapasitas kelembagaan dinas dalam pengelolaan cagar budaya dan memastikan adanya regulasi yang mendukung upaya pelestarian.
- h. Pemanfaatan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi informasi untuk dokumentasi, inventarisasi, pemetaan, dan promosi cagar budaya.
- i. Kerjasama:** Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, provinsi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Perbedaan utama dengan sasaran strategis sebelumnya adalah penekanan yang sangat spesifik pada pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Ini mengindikasikan bahwa dinas akan memprioritaskan program-program yang secara langsung berhubungan dengan identifikasi, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset-aset cagar budaya sebagai bagian penting dari upaya pemajuan kebudayaan lokal.

Dalam konteks ini, pemajuan kebudayaan lokal sangat erat kaitannya dengan pelestarian cagar budaya. Cagar budaya merupakan bukti *материальная* dari sejarah dan peradaban lokal, yang memiliki nilai edukatif, historis, dan budaya yang tinggi. Pelestarian yang efektif akan memastikan aset-aset ini tetap ada dan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat identitas budaya, menarik wisatawan, dan menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang. Pengelolaan yang baik akan memastikan pemanfaatan cagar budaya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Sasaran strategis "Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan melalui Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan" menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjadikan cagar budaya sebagai pilar penting dalam pemajuan kebudayaan lokal. Keberhasilan sasaran ini akan sangat bergantung pada kemampuan dinas dalam melaksanakan program-program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya secara efektif, melibatkan berbagai pihak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan budaya ini.

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran.

Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 136 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan hanya didukung oleh 42 orang ASN/PNS.

Tabel 3.12
Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
A	Struktural	4	4
	Kepala Dinas	1	-
	Sekretaris Dinas	1	-
	Kabid Paudikmas	-	1
	Kabid SD	-	1
	Kabid SMP	1	-
	Kabid Guru & Tenaga Kependidikan	-	1
	Kabid Kebudayaan dan Olah Raga	1	-
	Kasubag Umum	-	1
B	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	4	4
	Perencana Ahli Muda	-	1
	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	4	2
	Pamong Budaya Ahli Muda	2	-
	Analisis SDM Ahli Muda	2	1
	Penilik PAUD	2	-
	Pengawas TK	-	9
	Pengawas SD	8	8
	Pengawas SMP	7	3

B	Pamong Belajar	5	10
	Pranata Komputer	1	1
C	Jabatan Fungsional Pelaksana (JFP)	28	53
Jumlah		63	92
Laki-Laki dan Perempuan		155	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, 2024.

Adapun data sumber daya manusia aparatur dapat dilihat dari tingkat pendidikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezetting/Keadaan
1	SMP	34	6
2	SMA/D1/D2	304	50
3	D3	32	10
4	D4/S1	779	81
5	S2	8	8
Jumlah		1157	155

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, 2024.

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan SMA/D1/D2 berjumlah 50 orang atau 16,44 % dari kebutuhan, kemudian diikuti oleh Keadaan/Bezzeting pendidikan SMP berjumlah 6 orang atau 17,64% dari kebutuhan, pendidikan D3 berjumlah 10 orang atau 31,25% dari kebutuhan, S1/D4 berjumlah 81 orang atau 10,39%dari kebutuhan dan S2 berjumlah 8 orang atau 100% dari kebutuhan. Untuk mengatasiketerbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil denganmenambah beban tugasterhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahanpegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan.

2. Analisis Atas EfisiensiPenggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang berada dalam pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.

Adapun sarana prasana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan dapat dilihatpada tabel berikut:

Tabel 3.14
Jumlah Aset yang dimiliki dan tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Jumlah Aset yang tidak terpakai	
		Unit	Rp	Unit	Rp
1	Mobil	20	1,366,000,000.00	7	610,000,000.00
2	Motor	92	823,155,500.00	19	149,239,000.00
3	CCTV	3	103,828,400.00	3	103,828,400.00
4	PC	176	1,387,147,136.00	95	469,172,636.00
5	Server	1	10,735,000.00	1	10,735,000.00
6	Printer	140	588,735,860.00	92	247,832,860.00
7	AC	51	589,781,000.00	50	304,165,066.00
8	UPS	14	16,970,000.00	12	12,150,000.00
9	Aset Lainnya	15	3,960,326,220.00	-	-
Jumlah		593	9,739,678,163.11	295	2,093,544,466.11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, 2024.

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sarpras pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Kota Balikpapan dari jumlah jenisnya terdapat 11 jenis dengan jumlah unit 593 senilai Rp9,739,678,163.11 namun yang dalam kondisi tidak dipakai sebanyak 295 unit senilai Rp2,093,544,466.11 sehingga jumlah aset yang dapat dimanfaatkan sejumlah 298 unit (50,25%) senilai Rp7,646,133,697,00 (78,50%).

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,25	14,25	100,00%	Rp 548.572.445.553	Rp 505.315.688.629	92,11%	7,89%	Efisiensi
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,94	10,99	100,46%	Rp 548.572.445.553	Rp 505.315.688.629	92,11%	8,30%	Efisiensi
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	70,30	70,00	99,57%	Rp 487.441.291.891	Rp 396.935.323.492	81,43%	18,22%	-
3	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal yang dilestarikan	Presentasi Pemajuan Kebudayaan Lokal	%	0,75	0,93	124,00%	Rp 6.471.990.000	Rp 6.306.861.238	97,45%	21,41%	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, 2024.

Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relative baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2024 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran yang dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia" di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menunjukkan komitmen untuk meningkatkan potensi dan kemampuan individu melalui pendidikan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Harapan Lama Sekolah (HLS): Indikator ini merepresentasikan perkiraan jumlah tahun sekolah yang akan ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa depan. Target HLS yang ditetapkan adalah 14.25 tahun, dan capaian kinerja berhasil mencapai target tersebut, yaitu 14.25 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kebijakan di bidang pendidikan telah berhasil mempertahankan ekspektasi masyarakat terhadap lamanya pendidikan yang akan ditempuh oleh generasi muda.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS): Indikator ini menggambarkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah ditamatkan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Target RLS yang ditetapkan adalah 10.94 tahun, dan capaian kinerja menunjukkan hasil yang sedikit melampaui target, yaitu 10.99 tahun. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam tingkat pendidikan penduduk usia produktif di Kota Balikpapan.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 548,572,445,553.00. Dari anggaran tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp. 505,315,688,629.00.

Berdasarkan perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran, dapat dihitung tingkat efisiensi anggaran untuk masing-masing indikator:

- a. Efisiensi Anggaran HLS: 7.89%. Tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa target HLS berhasil dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari yang dialokasikan.
- b. Efisiensi Anggaran RLS: 8.30%. Serupa dengan HLS, target RLS juga berhasil dilampaui dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kualitas SDM" menunjukkan hasil yang positif. Target untuk Harapan Lama Sekolah berhasil tercapai, bahkan Rata-Rata Lama Sekolah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, pengelolaan anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang baik pada kedua indikator. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Balikpapan dengan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mencerminkan upaya untuk memperkuat pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator utama, yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah: Indikator ini merupakan representasi dari hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Target Nilai SAKIP yang ditetapkan adalah 70.30% (kemungkinan merujuk pada target skor atau tingkat implementasi). Realisasi Nilai SAKIP pada tahun 2024 tercatat sebesar 70.00%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan dengan baik dan hampir mencapai target yang diharapkan. Meskipun terdapat sedikit selisih, hasil ini mengindikasikan komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mendukung upaya peningkatan akuntabilitas kinerja ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 487,441,291,891.00. Dari anggaran tersebut, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp. 396,935,323,492.00, dengan tingkat realisasi mencapai 81.43%. Tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi ini menunjukkan adanya penyerapan anggaran yang signifikan dalam mendukung berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Capaian Nilai SAKIP sebesar 70.00% menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan telah memiliki sistem dan proses yang cukup baik dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Meskipun belum sepenuhnya mencapai target 70.30%, selisih yang kecil mengindikasikan bahwa upaya perbaikan dan penyempurnaan sistem akuntabilitas kinerja terus dilakukan.

Tingkat realisasi anggaran yang mencapai 81.43% menunjukkan adanya kesungguhan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja. Realisasi anggaran yang tinggi ini perlu diimbangi dengan kualitas pelaksanaan program dan pencapaian output/outcome yang diharapkan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis.

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" menunjukkan hasil yang cukup baik pada tahun 2024. Realisasi Nilai SAKIP yang mendekati target mengindikasikan adanya komitmen terhadap perbaikan sistem akuntabilitas kinerja. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi juga mencerminkan upaya dalam mendukung program-program terkait. Untuk kedepannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan perlu terus berupaya untuk mencapai target SAKIP yang ditetapkan dan memastikan bahwa setiap anggaran yang direalisasikan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.

Sasaran strategis "Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal" di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mencerminkan upaya untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan kekayaan budaya daerah. Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat identitas lokal, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya sendiri, serta menjadikan kebudayaan sebagai aset pembangunan daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator utama, yaitu Presentasi Pemajuan Kebudayaan Lokal.

Presentasi Pemajuan Kebudayaan Lokal: Indikator ini kemungkinan mengukur tingkat implementasi atau capaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan lokal. Target yang ditetapkan adalah 0.75%, dan realisasi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang melampaui target, yaitu 0.93%. Capaian yang melebihi target ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk memajukan kebudayaan lokal di Kota Balikpapan.

Untuk mendukung upaya pemajuan kebudayaan lokal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mengelola pagu anggaran sebesar Rp. 6,471,990,000.00. Dari anggaran tersebut, realisasi anggaran tercatat sangat tinggi, yaitu Rp. 6,306,861,238.00, dengan tingkat realisasi mencapai 97.45%. Tingkat realisasi anggaran yang hampir sempurna ini menunjukkan komitmen yang kuat dan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya untuk melaksanakan program-program pemajuan kebudayaan lokal.

Capaian indikator Presentasi Pemajuan Kebudayaan Lokal yang melebihi target menunjukkan efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam upaya memajukan kebudayaan lokal. Hal ini bisa mencakup berbagai aspek seperti pelestarian warisan budaya, pengembangan seni dan tradisi, pemanfaatan budaya dalam pariwisata dan pendidikan, serta promosi kebudayaan lokal kepada masyarakat luas.

Tingkat realisasi anggaran yang sangat tinggi (97.45%) mengindikasikan bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan untuk program pemajuan kebudayaan lokal telah berhasil diserap dan digunakan. Hal ini menunjukkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini.

Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam mencapai sasaran strategis "Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Lokal" pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Capaian indikator yang melampaui target, didukung oleh tingkat realisasi anggaran yang tinggi, mencerminkan keberhasilan dalam upaya melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal di Kota Balikpapan. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang untuk terus memperkuat identitas budaya daerah dan menjadikannya sebagai salah satu pilar pembangunan yang berkelanjutan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp797,831,392,257.00 atau 86.35% dari total anggaran yang dialokasikan, yaitu sebesar Rp 1.042.485.727.444,00 (Satu TriliunEmpat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)Adapun anggaran dan realisasinya, yang dipergunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja	
				Capaian	Pagu		
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Harapan lama Sekolah (HLS)	%	14.25		14.25	
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	%	10.94		10.99	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	%	87.13	Rp 545,972,626,153	107.45	Rp 466,428,948,275
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	90.1	Rp 220,874,889,610	105	Rp 188,565,048,484
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	96.86	Rp 235,827,437,243	109	Rp 201,730,808,746
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	30.3	Rp 44,992,011,500	28	Rp 39,820,812,829
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	PersentaseSPNF yang terakreditasi	%	85.71	Rp 44,278,287,800	68	Rp 36,312,278,216
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	%	91.95	Rp 2,399,819,400	92.45	Rp 2,166,190,100
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	71.05	Rp 2,399,819,400	76.08	Rp 2,166,190,100

2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%			0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	87.18	Rp 487,441,291,891	87.07	Rp 396,935,323,492
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82.03	Rp 400,000,000	70	Rp 246,754,169
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Nilai	87.95	Rp 476,251,346,926	87	Rp 387,162,607,606
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	82.99	Rp 167,258,800	86.93	Rp 37,325,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	86.43	Rp 909,000,000	87.04	Rp 869,120,539
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	86.21	Rp 6,235,624,590	87.28	Rp 5,412,868,859
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	87.24	Rp 1,421,233,575	87.14	Rp 1,318,872,447
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83.47	Rp 2,056,828,000	86.93	Rp 1,887,774,872
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	%	0.75		0.93	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	55.1	Rp 2,304,100,000	90	Rp 2,241,289,457
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	40	Rp 928,000,000	40	Rp 873,603,922
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	83.64	Rp 1,326,100,000	83	Rp 1,319,975,535
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	41.67	Rp 50,000,000	44	Rp 47,710,000

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	34.83	Rp 2,962,890,000	44	Rp 2,951,417,876
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	50	Rp 2,962,890,000	50	Rp 2,951,417,876
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	%	46.67	Rp 60,000,000	66	Rp 57,500,000
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	66.67	Rp 60,000,000	75	Rp 57,500,000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	97.06	Rp 1,145,000,000	96	Rp 1,056,653,905
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	97.06	Rp 145,000,000	85	Rp 98,074,103
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	21.43	Rp 1,000,000,000	83	Rp 958,579,802

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Disdikbud Balikpapan

Bab IV

Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder).

Laporan ini menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

Beberapa tantangan dalam bidang pendidikan antara lain: peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penerimaan peserta didik baru, pengelolaan Assesmen bagi siswa yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan penyebaran guru yang belum merata.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2024 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban tahun anggaran 2024 dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel kepada publik.

Melalui penyajian laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan tahun 2024 yang dapat disampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolak ukur dalam menilai.



Gambar 4.1 Kolase Kegiatan Disikbud Kota Balikpapan





"Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini adalah cerminan komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan dalam membangun sistem pendidikan dan pelestarian kebudayaan yang akuntabel, inklusif, dan berdaya saing. Melalui capaian indikator yang terukur dan transparansi kinerja, dokumen ini menjadi media komunikasi terbuka kepada masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang cerdas dan berbudaya."

Alamat : Jalan Ruhui Rahayu I, Sepinggian, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115